

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Badrulzaman, Mariam Darus, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Badrulzaman, Mariam Darus, 1991, *Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Bakti, Bandung.
- Busro, Achmad, 1985, *Hukum Perikatan*, Oetama, Semarang.
- Budiono, Herlian., 2006, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto, 2002, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hernoko, Agus Yudha, 2014, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Cetakan ke-4, Prenamedia Group, Jakarta.
- Hikmawati, Fenti, 2020, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Depok.
- Kusumastuti, Dora., 2019, *Perjanjian Kredit Perbankan dalam Perspektif Welfare State*, Deepublish, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Muhammad, Abdulkadir., 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Tjandra, W. Riawan, 2021, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Qirom Meliala, A., 1985, *Pokok-pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta.
- Salim, H. S., 2001, *Pengantar Ilmu Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika,

Jakarta.

Salim, H. S., 2021, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika,, Jakarta.

Satrio, J, 2001, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung. Setiawan, I. K. O., 2016, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sjahdeini, Sutan Remy, 1993, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Institute Bankir Indonesia, Jakarta.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, 1978, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta. Soekanto, S., 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Soekanto, Soerjono.dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sumordjono, Maria, 2019, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

Sutedi, Adrian, 2009, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian* (Cetakan ke X), PT. Intermasa, Jakarta.

Sumardi, Juajir, 1995, *Aspek-Aspek Hukum Franchise dan Perusahaan Multi Nasional*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Syaifuddin, M., 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Jakarta.

Tjitrosoepomo, S., 2017, *Asas-Asas Hukum Perikatan dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Umar, Dzulkifli dan Jimmy P., 2012, *Kamus Hukum*, Grahamedia Press, Surabaya.

Vollmar, H. F. A., 1978, *Hukum Benda*, Translated by Chaidir Ali. Bandung: Tarsito.

Widjaya, Gunawan, 2023, *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Zakiyah, 2015, *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta.

B. Skripsi/Jurnal/Penelitian

Adnan, I. Muchlis, Satoto S., dan Suryahartati, D., 2022, “Formulasi Perjanjian Baku dalam Rangka Perlindungan Hukum Konsumen PT PLN”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol 5, No.1.

Anisah, Siti, 2020, “Essential Facilities Doctrines Pada Penguasaan Pasar Oleh Badan Usaha Milik Negara.” *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana* 7, no 1.

Arifin, Yusuf Rachmat, dan Sapto Hermawan, 2021, “Dilematika Kebijakan Ketenagalistrikan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik di Indonesia”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 6, No.2.

Carlton, Dennis W., 2001, “A General Analysis of Exclusionary Conduct and Refusal to Deal: Why Aspen and Kodak Are Misguided.” *NBER Working Paper Series* 68, no 3, 2001.

Damayanti, Alfina Anam, 2021, Karakteristik *Essential Facilities Doctrine* Dalam Pasar Digital, *Skripsi*, Universitas Airlangga.

Djohan, Delima. 2011, Kedudukan PT PLN (Persero) Pasca Berlakunya Undang- Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Ditinjau Dari Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Djukhan, D., 2011, Kedudukan PT PLN (Persero) Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Ditinjau Dari Hukum Anti Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Tesis Pascasarjana*, Universitas Indonesia.

Handayani, Dwi, dan E. Gultom, 2023, “Privatisasi Dalam Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum,” *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no 1.

Hilmer, F., *et al*, 1993, *The National Competition Policy: Report by the Independent Committee of Inquiry*, Canberra.

Hutabarat, Riri Elizabeth, dan Sri Redjeki Slamet, 2015, “Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik”, *Lex Jurnalica*, Vol. 12,

No.1.

Irayanti, Nur, 2020, “Perspektif Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah & Penyedia Dalam Kontrak *E-Tendering* Pada Pengadaan Barang & Jasa Dikabupaten Luwu Utara”, *Jurnal Andi Djemma*, Vol. 3, No.2.

Lipsky, A. B., Jr., dan J. Gregory Sidak, 1999, “Essential Facilities,” *Stanford Law Review*, Vol 51, no 5.

Nuryanti, Scorpio dan S. Herdinie, 2007, “Analisis Karakteristik Konsumsi Energi Pada Sektor Rumah Tangga di Indonesia,” *Pusat Pengembangan Energi Nuklir (PPEN) BATAN*, ISSN 1978-0176.

Nugroho, Lucky Dafira, *et al.*, 2025, “Kedudukan Asas Proporsionalitas Dalam Perancangan Kontrak: Studi Normatif Terhadap Peraturan Terkait”, *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, Vol. 4, No.5.

Nurmansyah, Emir, Serafina Muryanti dan Adya Sepasthika, 2025, *Power Generation, Transmission & Distribution 2025 – Indonesia. Chambers Global Practice Guides*.

OECD, 1996, *The Essential Facilities Concept: Key Findings, Summary and Notes*, OECD Roundtables on Competition Policy Papers No. 5, OECD Publishing.

Paramitha, T. P, 2024, “Essential Facilities Doctrine Dalam Membatasi Penguasaan Pasar: Analisis Putusan Nomor 02/KPPU-I/2013,” *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no 4.

Parluhutan, D. 2021. “Analisis Hukum Kompetisi Terhadap ‘Big Data’ dan Doktrin ‘Essential Facility’ Dalam Transaksi Merger di Indonesia,” *Jurnal Persaingan Usaha* 1, no 1 (2021): 84.

Putera, Alvin Persada, 2024, “Implikasi Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 48 Tahun 2017 terhadap Kepastian Divestasi Saham bagi Investor Asing pada Proyek Pembangkit Listrik Independent Power Producer”, *Jurnal Ilmiah Global Education*, Vol 5, No 4.

Pitofsky, Robert, *et al.*, 2002, “The Essential Facilities Doctrine Under United States Antitrust Law,” *Antitrust Law Journal*, Vol 70.

Purcell, Joseph M., Jr, 2011, “The ‘Essential Facilities’ Doctrine in the Sunlight: Staking Patented Genetic Traits in Agriculture,” *St. John’s Law Review* 85, No 2.

Sahara, Anastasia Regita Rintan, dan Imelda Martinelli, 2025, “Penerapan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol 6, No 8.

Regina, Shilvia, 2021, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara PT PLN (Persero) dengan Pelanggan Rumah Tangga di Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Pekanbaru.

Trijono, Rachmat, 2023, “Regulatory Frameworks for Renewable Energy”, In S. Ariyanto & S. I. Heriyanti (Eds.), *Renewable Energy: Policy and Strategy*, BRIN Publishing.

Tobing, Priskila Putri Maharani, 2025, Menganalisis Doktrin Fasilitas Penting Terhadap Efektivitas Posisi Monopoli PLN Dalam Kaitannya Dengan Distribusi Listrik Terbarukan di Indonesia, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Yuanitra, Ira, 2010, Karakteristik Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), *Tesis Magister*, Fakultas Hukum, Universitas Surabaya.

Wardhana, N, 2018, “Legal Analysis of the Doctrine of Essential Facilities Duties in the Indonesia Competition Law”, *Diponegoro Law Review* 3, no. 2.

C. Internet

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring”, Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses 25 September 2025.

Ferdiansyah, B., 2024, “Kemitraan Pemerintah–PLN–IPP Dinilai Dapat Wujudkan Kemandirian Energi,” Antara News. <https://www.antaranews.com/berita/4539694/kemitraan-pemerintah-pln-ipp-dinilai-dapat-wujudkan-kemandirian-energi>. Diakses 11 September 2025.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023, “Listrik Baik Untuk Indonesia Mandiri Energi: Pemerintah Terus Mendorong Percepatan Transisi Energi Di Dalam Negeri Guna Mencapai Target Net Zero Emission Pada 2060.” <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/4996/pemerintah>. Diakses 12 September 2025.

Savitri, P. I., 2025, "RUPTL PLN 2025–2034 Buka Keran Investasi Swasta," *Antara News Kupang*.
<https://kupang.antaranews.com/berita/158445/ruptl-pln-2025--2034-buka-keran-investasi-swasta>. Diakses 12 September 2025.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 4 Halaman, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5281).

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 27).

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 259).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik dan Tata Cara Permohonan Penetapan Tarif Tenaga Listrik. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 453).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 671).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dari Pembangkit yang Memanfaatkan Sumber Energi Terbarukan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 145).

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Oleh Swasta. (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1992).